

SINOPSIS

Kemiskinan secara empiris masih menjadi permasalahan utama di Indonesia yang secara substantif diindikasikan dengan rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan, dan taraf kesehatan. Oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi agenda utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Pada konteks ini, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan kebijakan yang dirilis oleh pemerintah untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dengan titik berat pada pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan PPK di Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian adalah *stakeholder* kebijakan PPK di Desa Cendil dari unsur implementor program maupun kelompok sasaran yang dipilih secara *purposive*. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan PPK terwujud model pembangunan yang partisipatoris secara prosedural dan bersifat *bottom up*. Masyarakat secara kelembagaan memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya sebagai subyek atau pelaku aktif dari pengelolaan kegiatan pembangunan secara komprehensif, mulai dari proses perencanaan sampai pelestariannya. Hasil-hasil pembangunan, baik fisik maupun non fisik, secara nyata dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat luas dan pengelolaannya juga terwujud secara berkelanjutan sehingga kondusif untuk mengatasi kemiskinan. Adanya respon positif dan apresiasi dari masyarakat luas dan para pelaku PPK menjadi cermin bahwa isi dan konteks kebijakan PPK sudah memiliki kesesuaian dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan segala kondisi yang ada maka secara substantif kebijakan PPK di lokasi penelitian sudah *implemented*. Memang masih dijumpai adanya beberapa kendala dan permasalahan di lapangan, namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan gangguan serius pada implementasi kebijakan secara keseluruhan sehingga tidak terjadi *implementation gap*.

Beberapa saran penulis adalah pengelolaan dana untuk kegiatan apapun perlu dilakukan secara lebih transparan. Hal ini sangat penting perannya dalam rangka membangun dukungan dan kepercayaan publik maupun partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Alokasi dana untuk kegiatan non fisik, yaitu ekonomi produktif, perlu ditingkatkan karena manfaat langsungnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam menggerakkan usaha produktif. Kreativitas masyarakat maupun para